Peran Gereja dalam Perpolitikan di Indonesia

Slamet Wiyono, M.Th.

Dosen di Sekolah Tinggi Teologi Makedonia Ngabang

I. Kondisi situasi Gereja di Indonesia

Saat ini Gereja-gereja di Indonesia bagai berada di ujung tanduk. Betapa tidak, di negeri yang dikenal orang ber-Bhineka tunggal ika, intoleransi justru bertumbuh pesat. Di negri yang terkenal dengan keramahannya, kekerasan seperti dipelihara. Ini bukanlah ungkapan kekesalan sepihak, tapi data memang membuktikan demikian. Lihat saja bagaimana data perusakan gereja-gereja di Indonesia yang dirilis Persekutuan Geraj-gereja di Indonesia (PGI), sebagai reperestasi gereja, menunjukkan masifnya tindakan intoleran yang dialami oleh orang kristen, khususnya yang diluapkan dalam pembakaran gereja.

PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA DI INDONESIA: Data Penutupan dan Perusakan Gedung Gereja

1. Perusakan Gedung Gereja Selama Pemerintahan Presiden Pertama Republik Indonesia SOEKARNO 17 Agustus 1945 s/d 7 Maret 1967 : 2 Gedung Gereja (rata-rata per bulan = 0.008)
2. Penutupan, Perusakan dan atau Pembakaran Gedung Gereja Selama Pemerintahan Presiden Kedua Republik Indonesia SOEHARTO 7 Maret 1967 s/d 21 Mei 1998 : 456 Gedung Gereja (rata-rata per bulan = 1.19)
3. Penutupan, Perusakan dan atau Pembakaran Gedung Gereja Selama Pemerintahan Presiden Ketiga Republik Indonesia Prof. Dr. Ing. B.J. HABIBIE 21 Mei 1998 s/d 20 Oktober 1999 : 156 Gedung Gereja (rata-rata per bulan =9.18)

4. Penutupan, Perusakan dan atau Pembakaran Gedung Gereja Selama Pemerintahan Presiden Keempat Republik Indonesia K.H. ABDURRAHMAN WAHID 20 Oktober 1999 s/d 23 Juli 2001 : 232 Gedung Gereja (rata-rata per bulan = 11.05)
5. Penutupan, Perusakan dan atau Pembakaran Gedung Gereja Selama Pemerintahan Presiden Keempat Republik Indonesia MEGAWATI SOEKARNO PUTRI 23 Juli 2001 s/d 4 Mei 2004 : 92 gedung Gereja (rata-rata perbulan = 2.706)¹

Angka tersebut di atas belum termasuk di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Di dua periode pemerintahannya, makin banyak lagi pembakaran dan penghancuran gereja di Indonesia. SETARA Institute mencatat, Pada tahun 2007 saja terjadi 135 peristiwa pelanggaran dengan 185 jenis tindakan; sementara pada tahun 2008 terjadi 265 peristiwa pelanggaran dengan 367 tindakan, dan pada tahun 2009 terjadi 200 peristiwa dengan 291 tindakan.²

Pelanggaran kebebasan beragama yang terjadi selama tiga tahun tersebut, seperti dirilis SETARA meliputi isu-isu dominan seperti: [1] pendirian rumah ibadah; [2] penyesatan keyakinan/aliran keagamaan; [3] pengrusakan tempat ibadah; dan [4] peraturan perundangundangan dan kebijakan diskriminatif.

Dalam tiga tahun laporan kebebasan beragama/ berkeyakinan yang dipublikasikan SETARA Institute menunjukkan bahwa pelanggaran kebebasan beargama/ berkeyakinan masih terus terjadi dengan angka yang cukup tinggi. Baik negara maupun warga negara sama-sama berpihak

¹ Sumber Website Diakonia PGI

² SETARA Institute, Tiga Tahun Laporan Kondisi KebebasanBeragama/ Berkeyakinandi Indonesia 2007-2009

dan bertindak intoleran sebagaimana terlihat pada sajian angka-angka di atas. Perundang-undangan dan kebijakan yang diskriminatif warisan masa lampau dan yang diproduksi pascareformasi, masih terus dipelihara oleh rezim saat ini dan telah menjadi pemicu dan pemacu pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan.

Dari pelbagai jenis dan bentuk peristiwa yang terjadi, menunjukkan bahwa sendi kebangsaan kita semakin terancam. Toleransi, yang menjadi sendi dasar kehidupan bersama dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, kini tengah digugat oleh proses-proses yang sangat menguatirkan. Hal ini bila terus dibiarkan akan menghilangkan kebebasan berkeyakinan yang sepenuhnya dijamin oleh UUD 1945. Sementara pihak yang paling banyak menjadi korban atau mengalami tindak kekerasan dari kelompok-kelompok intoleran adalah gereja, yang ditunjukkan (buktikan) dengan maraknya penutupan rumah ibadah.

Menanggapi maraknya pembakaran dan penghancuran gereja sampai dengan tahun 2007, PGI, yang diwakili oleh Pdt. Gomar Gultom, Sekretaris Eksekutif Bidang Diakonia PGI Periode 2004-2009, dalam pernyataan sikapnya mengatakan, bahwa berbagai aksi penutupan rumah ibadah tersebut menunjukkan adanya politik pembiaran oleh negara dan aparat keamanan. Bahkan yang lebih tragis lagi, di beberapa tempat terkesan aksi ini didukung oleh aparat keamanan dengan alasan pengalihan fungsi bangunan dari rumah tinggal ke rumah ibadah. Hal ini terlihat misalnya sangat nyata dalam beberapa kali peristiwa yang terjadi di Bandung sepanjang tahun 2005.³

Peristiwa-peristiwa menyedihkan seperti dicatat PGI dan Setara bukanlah kali terakhir terjadi. Beberapa pekan lalu di Aceh juga terjadi aksi

³ PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA DI INDONESIA: Mengamati Penutupan Tempat-tempat Ibadah Sepanjang 2004-2007

pembakaran dan perobohan gereja dengan mengatasnamakan mayoritas penduduk sekitar beragama Islam dan dengan alasan demokrasi meminta warga gereja menghargai keinginan mayoritas. Ditambah “penguatan” dengan mengatasnamakan aturan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, tentang kerukunan umat beragama, yang didalamnya mengatur tatacara pendirian rumah ibadah.

Sementara itu alasan lain yang seringkali dijadikan momok sekaligus kambing hitam adalah alasan tentang pemurtadan terhadap orang-orang muslim (pindah agama) atau sering disebut kristenisasi. Dengan alasan yang sangat subyektif itu, lalu masyarakat atas nama mayoritas seenaknya saja menutup rumah ibadah (gereja).

Lalu apa kaitan ini dengan peran gereja dalam berpolitik? Dengan melihat maraknya tindakan diskriminatif terhadap gereja, maka gereja sendiri, baik sebagai lembaga maupun perorangan (pribadi) harus mengambil sikap agar suara mereka terdengar oleh pemerintah atau seluruh bangsa. Dengan demikian mereka tidak dianggap remeh oleh orang-orang intoleran yang mengatasnamakan mayoritas. Sebab dikotomi mayoritas-minoritas, dalam konteks berbangsa dan bernegara sesungguhnya tidak ada. Karena setiap orang baik itu dari kalangan mayor pun dari sekelompok minor memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dihadapan negara dan di mata hukum. Hak-hak dan kewajiban inilah yang perlu diperjuangkan oleh gereja, baik perorangan maupun lembaga. Untuk itulah perlu dirumuskan bagaimana caranya. Bagaimana gereja dapat berkontribusi dalam ranah perpolitikan di Indonesia. Cara-cara atau strategi seperti apa yang baik dan bisa dilakukan oleh gereja untuk berkontribusi di ranah politik Indonesia.

II. PENGERTIAN DAN DEFINISI

A. Pengertian Gereja

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberi arti untuk istilah gereja sebagai: 1 gedung (rumah) tempat berdoa dan melakukan upacara agama Kristen; dan 2 badan (organisasi) umat Kristen yang sama kepercayaan, ajaran, dan tata cara ibadahnya Istilah ini sendiri merupakan “serapan” kata dari bahasa asing, tepatnya terambil dari kata dalam bahasa Portugis “*igreja*”. Kata dengan arti serupa yang dalam bahasa Yunani digunakan “*ekklesia*”. Tidak hanya satu, dalam Yunani, kata yang menunjuk pada istilah gereja juga menggunakan istilah lain, yaitu “*kuriakon*” yang jika diartikan secara literal berarti “(rumah) Tuhan”. Sementara dalam bahasa lain, yang mengacu pada istilah Yunani tersebut digunakan kata “*church*” (bahasa Inggris) dan “*kerk*” (Bahasa Belanda).

Ekklesia menurut Thomas van den End berarti: mereka yang dipanggil. Yang pertama dipanggil oleh Kristus ialah para murid, Petrus dan yang lain- lain. Selanjutnya, sesudah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dan pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta, diikuti oleh para murid itu menjadi “*rasul*”, artinya: “mereka yang diutus”. Rasul-rasul diutus ke dalam dunia untuk mengabarkan berita kesukaan, sehingga lahirlah gereja Kristen.⁴

Definisi diatas bukanlah definisi satu-satunya. Menurut E. Martasudjita, Pr, definisi Gcreja yang dianut agak lama ialah definisi yang berasal dari Robertus Bellarminus yang mengatakan, bahwa Gereja adalah himpunan manusia yang diikat melalui pengakuan iman kristiani dan peran sertanya dalam sakramen-sakramen Gereja (maksudnya: tujuh sakramen,

⁴ Thomas van den End, Harta dalam bejana: sejarah gereja ringkas, BPK Gunung Mulia, hlm. 1

menurut katolik) dan yang ada di bawah pimpinan Gembala yang sah, terutama satu-satunya Wakil Kristus, yakni Uskup Roma. Dengan demikian, Gereja lebih dilihat sebagai organisasi hierarkis dengan pimpinan tertinggi Sri Paus di Roma. Gereja sangat menekankan segi luarnya, organisasinya, tata-aturan, dan hukumnya.⁵

Dalam penggunaannya, khususnya dalam teologi sistematika, istilah gereja mengacu pada dua maksud. Pertama, dapat disebut segi obyektif, gereja dilihat sebagai tempat di mana manusia bertemu dengan keselamatan yang diberikan Allah kepadanya dalam Yesus Kristus. Di sini Gereja dipandang sebagai suatu lembaga atau institusi yang mengantarkan keselamatan ini kepada manusia. Orang-orang percaya menjadi anggota gereja untuk mendengar mengenai keselamatan Allah dan menerima bagian di dalamnya. Orang percaya datang ke gereja untuk mendengarkan Firman yang disampaikan dalam khotbah atau ajaran dan untuk menerima sakramen-sakramen yang dilayankan. Kedua, dapat juga disebut segi subyektif. Gereja dilihat sebagai persekutuan orang-orang percaya yang ingin beribadah kepada Allah. Gereja tidak hanya tempat di mana manusia mendengar dan menerima, tetapi juga tempat di mana manusia menjawab dan memberi. Demikianlah gereja adalah juga ungkapan iman orang-orang percaya, suatu persekutuan yang dibentuk manusia untuk bersama-sama bertumbuh dalam iman dan untuk menyebarkan Injil Yesus Kristus di mana-mana, supaya bangsa Allah di dunia ini semakin besar.⁶

Dari beberapa arti dan definisi diatas, ada beberapa unsur yang penting dari gereja. Bahwa gereja bukan saja sebuah gedung tempat

⁵ E. Martasudjita, Pr., Sakramen-Sakramen Gereja: Tinjauan Teol, Liturgis, Past, Kanisius, 2003

⁶ Dr. Jan S. Aritonang dan Dr. Chr De Jonge, Apa dan bagaimana gereja?: pengantar sejarah eklesiologi, BPK Gunung Mulia, 1989, hlm. 5

beribadah atau sebuah lembaga yang menaungi. Gereja juga adalah personal atau pribadi atau orang-orang yang bersekutu di dalamnya, yang memiliki tugas dan tanggungjawab, tidak hanya bagi diri dan Tuhannya, tapi juga kepada lingkungan sosialnya. Tanggungjawab seperti apakah itu, adalah tanggungjawab yang jika memakai bahasa yang sering digunakan oleh Dr. Yakob Tomatala, adalah menyebarkan Shalom. Hal ini sangat penting, mengingat manusia masih hidup membumi dan bukan melangit. Mengingat manusia masih menjejakkan kaki di dunia dan bukan surga. Oleh karena itu manusia harus menjadi agen penebar shalom bagi khalayak sekitarnya, di pelbagai ranah, termasuk di ranah politik. Seperti apa caranya dan perannya akan dijelaskan dalam bab-bab selanjutnya.

B. Pengertian Politik

Politik berasal dari bahasa Yunani: politikos, yang berarti dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara, merupakan proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik.⁷ KBBI mengartikan politik dalam beberapa bagian: 1 Politik sebagai pengetahuan, berarti terkait atau mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti tentang sistem pemerintahan, dasar pemerintahan); 2 segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain; 3 cara bertindak dalam menghadapi atau menangani suatu masalah⁸

⁷ <https://id.wikipedia.org/wiki/Politik>

⁸ <http://kbbi.web.id/politik>

Politik sering dianggap sebagai sebuah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional. Politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain:

- politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles)
- politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara
- politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat
- politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik (politics) ada-lah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistim politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dan sistim itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Politik juga berkaitan dengan pengambilan keputusan (decisionmaking) mengenai apakah yang menjadi tujuan dan sistim politik itu menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dan tujuan-tujuan yang telah dipilih itu. Untuk melaksanakan tujuan-tujuan itu, seperti ditulis Miriam Budiardjo dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik, perlu ditentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan umum (public policies) yang menyangkut pengaturan dan pembagian (distribution) atau alokasi (allocation) dari sumber-sumber dan resources yang ada.

Selanjutnya, untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan itu, perlu dimiliki kekuasaan (power) dan kewenangan (authority), yang akan dipakai baik untuk membina kerja sama maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses ini. Cara-cara yang dipakainya dapat bersifat persuasi (meyakinkan) dan jika perlu bersifat paksaan (coercion). Tanpa unsur paksaan kebijaksanaan ini hanya merupakan perumusan keinginan (statement of intent) belaka.

Politik, masih menurut Miriam, selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat (public goals), dan bukan tujuan pribadi seseorang (private goals). Lagipula politik menyangkut kegiatan berbagai-bagai kelompok termasuk partai politik dan kegiatan orang seorang (in-dividu).⁹

C. Situasi Politik Di Indonesia

Politik di Indonesia dalam beberapa tahun ini begitu sangat dinamis. Ditandai oleh reformasi di akhir tahun 1998, geliat perpolitikan di Indonesia begitu menanjak tajam. Bak harimau keluar dari kandang, paska keran demokrasi itu dibuka lebar orang seperti kesetanan untuk mengekspresikan diri dan kebebasan. Bukan sesuatu yang mengejutkan, mengingat selama kurun 32 tahun bangsa Indonesia ditekan kebebasannya untuk berekspresi dan menentukan hak atau pilihan berpolitik sendiri.

Ada sisi-sisi baik di mana demokrasi memberi ruang begitu besar bagi masyarakat untuk mengeluarkan aspirasinya. Tapi di sini lain, demokrasi di Indonesia berubah rupa menjadi tidak lebih dari suara terbanyak (mayoritas) dan bukan sebuah mufakat yang memberi dampak positif bagi rakyat atau bangsa Indonesia.

Puncak drama perpolitikan di Indonesia terjadi selepas pemilihan umum (PEMILU) langsung memilih Presiden dan Wakilnya. Betapa rakyat disuguhi dengan dagelan politik yang tidak lucu sama sekali, tapi justru membuat perut ini sakit. Betapa tidak, jika yang dipertontonkan ke ranah publik tidak lebih dari perebutan kekuasaan dan penguasaan. Yang ditunjukkan kepada rakyat adalah “besar-besaran” kekuatan politik. Mana yang lebih unggul atau mana yang lebih hebat. Koalisi A atau kolaisi B.

⁹ Miriam Budiardjo , Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 8

Partai ini atau partai itu. Belum lagi soal “balas dendam,” serang menyerang lawan politik, dan menyetop kebijakan pemerintah yang dianggap berasal dari “lawan politik”.

Belum lagi soal egosentrisme Partai yang begitu kental terasa. Para wakil rakyat yang telah mereka pilih nyatanya tidak menyuarakan aspirasi mereka. Para wakil rakyat itu hanya menyuarakan apa maunya partai atau koalisi mereka. Lihat saja bagaimana tarik ulur revisi undang-undang KPK. Bukankah sebelumnya kelompok atau koalisi partai-partai dari Kolaisi Merah Putih (KMP) yang kencang bersuara terkait revisi undang-undang KPK. Tapi kenapa kini, setelah partai-partai dari koalisi Indonesia Hebat (KIH), dimotori partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendorong percepatan revisi undang-undang KPK, koalisi dari KMP justru menolaknya. Itu hanya satu dari sekian banyak contoh bunglonisasi perpolitikan Indonesia.

III. PERAN GEREJA DI DUNIA POLITIK

Di alam politik Demokrasi seperti di Indonesia ini, peran Warga Negara sangatlah dibutuhkan demi terciptanya masyarakat yang demokratis, sehingga peran warga Negara ini dapat menjadi acuan untuk terciptanya pemerintahan yang demokratis pula. Demi terciptanya masyarakat yang demokratis tersebut maka dibutuhkan tidak lain dari keikutsertaan warga masyarakat dalam politik. Sehingga peran aktifnya dalam politik dapat mengembangkan partisipasi politik yang berpengaruh terhadap sistem politik Negara dan pemerintahannya. Di sinilah peran aktif Gereja, baik sebagai Lembaga maupun pribadi sangat dibutuhkan.

A. Gereja sebagai Pribadi (Organis)

Dalam penggunaannya, seperti telah dijelaskan di bagian sebelumnya, istilah gereja mengacu pada dua maksud yang berbeda. Pertama, gereja dilihat sebagai suatu lembaga dan kedua gereja lebih dilihat

sebagai persekutuan orang-orang percaya yang ingin beribadah kepada Allah (organisasi/ personalnya). Gereja sebagai pribadi spiritual dan “duniawi”, karena berada dan terikat dalam sistem pemerintahan yang ada di dunia ini, memiliki dua kewarganegaraan yang berbeda. Di mana masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

1. Gereja sebagai Warga Kerajaan Allah

Pada umumnya Kerajaan Allah (Kerajaan Sorga) dimengerti sebagai Allah yang datang ke dunia untuk menyatakan kuasa, kemuliaan, dan hak-hak-Nya melawan kekuasaan Iblis dan garis haluan dunia yang sekarang ini. Kerajaan Allah merupakan pengertian yang lebih luas daripada keselamatan atau gereja; Kerajaan Allah ialah Allah mengungkapkan diri-Nya dengan penuh kuasa dalam semua karya-Nya.

Menurut kepercayaan orang Yahudi, bangsa Israel adalah Kerajaan Allah sejak dulu. Allah sendirilah Raja bangsa itu. Tetapi bangsa Israel adalah bangsa yang telah jatuh, Kerajaan Allah pun tersembunyi dan diselubungi. Tetapi kelak pada satu waktu, Mesias akan datang, dan kalau Dia sudah datang, maka Kerajaan Allah akan datang pula dengan segala kemuliaannya. Dalam nubuat-nubuat Perjanjian Lama ada tiga hal yang diterangkan dengan jelas tentang Kerajaan yang akan datang itu. Pertama, menurut pengajaran nabi-nabi, Kerajaan yang akan datang itu bersifat am: Yahweh (TUHAN) akan menjadi Raja atas seluruh bumi (Za. 14:9). Segala bangsa akan turut ambil bagian dalam kemuliaan Kerajaan itu (Yes. 25:6-9). Kerajaan itu datang dari sorga pula, tak ada dosa padanya. Nabi Yehezkiel telah menerangkan itu dalam nubuatnya. Allah akan mengaruniakan hati yang baru dan roh yang baru (Yeh. 36:26).

Orang Yahudi, pada masa hidup Yesus, menanti-nantikan Kerajaan itu. Akan tetapi pikiran mereka tentang Kerajaan itu lain sekali daripada yang dimaksud Allah. Mereka lupa bahwa Kerajaan Mesias itu adalah suci dan datang dari sorga. Pikiran mereka terlalu bersifat nasionalis; menurut

pendapat mereka, Mesias itu akan membinasakan bangsa-bangsa lain dalam suatu perang besar dan akan memuliakan Israel. Lagipula mereka ber-pikir, bahwa semua orang Israel akan diterima oleh Mesias, karena mereka adalah anak-anak Abraham. Jadi mereka mencita-citakan suatu Kerajaan yang nampaknya penuh dengan kemuliaan dan keindahan, mereka lupa bahwa Kerajaan Mesias adalah suatu Kerajaan cintakasih dan ketenangan¹⁰.

Dalam dokumen keesaan gereja Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dijelaskan, bahwa Kerajaan Allah adalah kuasa dan pemerintahan Allah yang menyelamatkan yang tampak dan berwujud di dalam lingkungan dan suasana hidup yang di dalamnya terdapat kasih, kebenaran, keadilan, damai sejahtera, kesukacitaan, pemulihan dan pembaruan hidup (Mzm. 145:11-13; Mat. 9:35; 11:2-9; Luk. 4:21; 4:43; Rm. 14:7; 1 Kor. 4:20). Kehadiran Kerajaan Allah telah menjadi nyata dalam kehidupan dunia dan umat manusia dengan kedatangan Yesus Kristus, Raja dan Juruselamat dunia (Mrk. 1:15). Namun demikian, pernyataan Kerajaan Allah secara penuh baru akan terjadi dalam "langit baru dan bumi baru" (2 Ptr. 3:13; Why. 21:1)." Ketika dalam nama Yesus bertekuk lutut, segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah, Bapa" (Flp. 2:10-11). Oleh karena itu, gereja dan orang-orang percaya mendoakan dan menyongsong penggenapan Kerajaan Allah itu dengan secara tekun bekerja menegakkan tanda-tanda Kerajaan Allah di dalam kehidupan sehari-hari (Mat. 6:10,33; 25:1-46).¹¹ Di sinilah sesungguhnya

¹⁰ Johan Herman Bavinck, Sejarah Kerajaan Allah 2 Perjanjian Baru, BPK Gunung Mulia, 1986, hlm.99-100

¹¹ _____, Lima dokumen keesaan gereja Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (LDKG-PGI): keputusan Sidang Raya XII PGI, Jayapura, 21-30 Oktober 1994, BPK Gunung Mulia, 1996, hlm. 51-52

peran gereja sebagai warga kerajaan Allah sangat penting ditunjukkan. Sebab kerajaan Allah tidaklah ada dalam ranah teoritis atau ranah iman, tapi membumi dalam ranah sosial dan ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari.

Di sini gereja sebagai persekutuan orang percaya dan sekaligus warga kerajaan dipanggil untuk menjalankan suatu kehidupan baru sesuai dengan tuntutan Kerajaan Allah (Mrk. 1:15; Ef. 4:11; 2 Ptr. 1:10-11). Hidup yang berpadanan dengan tuntutan Kerajaan Allah adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Allah yang Kudus yang membuahkan kasih, sukacita, damai sejahtera, keadilan dan kebenaran (Ef. 5:3 dst.; Gal. 5:21). Sebagai warga Kerajaan Allah, orang-orang percaya diandaikan dapat menjadi warga kerajaan yang tahan uji di dalam menghadapi segala tantangan, penganiayaan, penderitaan, karena pengharapan di dalam Yesus Kristus akan pengenaan Kerajaan Allah (Kis. 14:22; 2 Tes. 1:3-5; 1 Ptr. 3:13-15). Gereja dan orang-orang percaya memiliki kewajiban besar untuk bersaksi dan memberitakan kedatangan Kerajaan Allah dengan tekun menjalankan pelayanan dalam kasih, kebenaran, keadilan, dan damai sejahtera terhadap semua orang di pelbagai ranah dan tempat. Mulai dari keluarga hingga dunia kerja. Dari kalangan rakyat atau organisasi terkecil di masyarakat, sampai terbesar, ke ranah politik berbangsa.

2. *Gereja sebagai Warga Negara Indonesia*

Pada dasarnya baik warga kerajaan Allah maupun warga dari sebuah negara tidak dapat dipisahkan begitu saja. Sebab, meskipun dalam konteks spiritual orang adalah warga kerajaan Allah, namun perwujudan atau pemenuhan hak dan kewajiban sebagai warga kerajaan tidaklah nanti ketika orang berada di Kerajaan Kekal Allah, tapi di sini, didunia ini, di negara ini. Dengan demikian, perwujudan sebagai warga kerajaan Allah harus diejawantah dan ekspresikan dalam ranah atau konteks sebagai

warga sebuah negara. Menurut Robert Borong, dua kewarganegaraan ini tidak boleh dipisahkan

“Kepedulian terhadap masalah politik bukan hanya perlu melainkan merupakan kewajiban orang kristen, bukan saja karena ia warga negara tetapi karena ia warga gereja. Artinya kepedulian kita pada masalah politik bukan karena politik merupakan kewajiban setiap warga negara saja, melainkan kewajiban selaku warga gereja yang dihadirkan oleh Tuhan di dunia ini untuk berkarya bagi dunia dan khususnya bagi bangsa dan negara. Maka kewajiban sebagai warga negara tidak bisa dipisahkan dari kewajiban sebagai warga gereja.”¹²

Hal senada juga dikatakan Saut Hamonangan Sirait dalam salah satu bukunya, bahwa berinteraksi dengan realitas dan kehidupan sosial merupakan keharusan. Hal ini kata Sirait, Bukan hanya disebabkan kodrat alami, melainkan juga karena adanya kekhususan religiositas atau spiritual sebagai umat Allah.¹³

Sebagai warga dalam sebuah negara, dalam konteks ini adalah indonesia, warga gereja/ warga kerajaan Allah terikat dalam suatu sistem pemerintahan yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban warganya. Hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945 yaitu tercantum di dalam pasal 27, pasal 28, pasal 29, pasal 30, dan pasal 31. 1.

12 Borrong, Robert P, Etika Politik Kristen: Serba-serbi Politik Praktis, Hlm 2

¹³ Pdt. Saut Hamonangan Sirait, Politik Kristen di Indonesia: suatu tinjauan etis, BPK Gunung Mulia hlm 66

- 1) Pasal 27 ayat 1 menetapkan hak warga negara yang sama dalam hukum dan pemerintahan, serta kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan.
- 2) Pasal 27 ayat 2 menetapkan hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- 3) Pasal 27 ayat 3 dalam Perubahan Kedua UUD 1945 menetapkan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
- 4) Pasal 28 menetapkan hak kemerdekaan warga negara untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan.
- 5) Pasal 29 ayat 2 menyebutkan adanya hak kemerdekaan untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya.
- 6) Pasal 30 ayat 1 dalam Perubahan Kedua UUD 1945 menyebutkan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
- 7) Pasal 31 ayat 1 menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

Untuk itu, sebagai warga negara yang baik, warga negara harus berperan, baik secara pasif dan aktif dalam sistem pemerintahan negara ini. Secara pasif, warga negara sekaligus warga negara Indonesia harus patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Harus ikut dan turut dalam kegiatan menaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan setiap keputusan pemerintah.

Selanjutnya, secara aktif, warga negara harus terlibat (berpartisipasi) serta dalam ambil bagian dalam kehidupan bernegara, terutama dalam mempengaruhi keputusan dan kebijakan publik seperti pemilu. Bukan dalam rangka mempengaruhi mengintervensi jalannya pemilu, tapi berperan serta mengawasi dan memastikan pemilu berlangsung dengan baik, jujur, bersih dan adil.

Tugas mengawasi jalannya pemilu secara independent adalah bentuk konkrit partisipasi gereja (organ/person) di ranah politik. Sebab bukan hal asing lagi bahwa pesta demokrasi seperti pemilu banyak kecurangan. Misalnya yang sering ditemui adalah adanya money politik (politik uang) yang menciderai integritas dan kewibawaan perpolitikan Indonesia. Tentang praktik busuk seperti itu gereja secara perorangan pun lembaga harus tegas, keras dan tangkas dalam mengawasi. Sebab, selain melanggar norma-norma moral dan spiritual, praktik semacam itu jelas-jelas melanggar aturan hukum positif Indonesia, sebagaimana diatur dalam. Pasal 73 ayat 3 Undang Undang No. 3 tahun 1999 berbunyi: *"Barang siapa pada waktu diselenggarakannya pemilihan umum menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan pidana hukuman penjara paling lama tiga tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu."*

Mengapa gereja perlu dan wajib mengawasi pemilu dari ancaman praktik politik uang, sebab hal itu berdampak luas, baik secara sosial dan mental, baik kepada masyarakat, pun politisi yang membagi uang itu sendiri. Bagi politisi, mereka akan merasa bahwa apa yang dilakukannya bukanlah suatu kesalahan atau tindakan melawan hukum, bahkan merasa itu adalah tindakan terpuji, karena toh dia mengeluarkan uang untuk diberikan kepada rakyat. Tindakan ini sesungguhnya bukan tindakan manusiawi. Sebab memanfaatkan celah kemiskinan masyarakat, celah ketidakmampuan masyarakat bagi tujuan politik haramnya.

Sementara itu, bagi Masyarakat: politik uang membuat masyarakat menjadi semakin permisif terhadap praktik korup, yang sesungguhnya berdampak buruk bagi kehidupan sosial pun spiritual, baik dalam konteks bangsa pun personal. Politik uang membuat masyarakat juga ikut menjadi korup, karena mental materialisme yang telah mengkristal dalam diri

mereka akibat ulah segelintir politisi dan partai yang tidak bertanggungjawab. Menjadikan pemilihan pemimpin, mulai tingkat RT sampai pemilihan Presiden sebagai lahan mengeruk keuntungan materi. Padahal dengan bersikap seperti itu berarti masyarakat/ rakyat telah menggadaikan hak politik mereka.

Tanggung jawab seorang warga gereja yang juga sekaligus warga negara juga diatur dalam Surat Paulus kepada jemaat di Roma, dalam Roma 13:1-7. Di sini warga gereja memiliki tugas penting yang harus dilakukan, yakni:

1. Taat kepada peraturan dan hukum negara (ay 2)

Sebagai orang percaya, warga gereja sekaligus warga negara, orang Kristen wajib mengikuti semua ketentuan dan aturan yang ditetapkan oleh negara, jika kita tidak mentaati aturan sebenarnya kita dikatakan melawan dan melanggar ketentuan Allah, karena Allah yang menetapkan suatu pemerintahan. Tidak ada satu negara yang bisa berdiri jika Allah tidak menentukannya. Ketaatan kita kepada pemerintah bisa menjadi kesaksian yang baik.

2. Tidak melakukan kejahatan.

Kejahatan selalu ada dimana-mana, setiap kejahatan ada sanksi dan hukuman dari negara. Kejahatan menimbulkan keresahan dan kecemasan bagi banyak orang yang nantinya akan berpengaruh terhadap lancarnya pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Itulah sebabnya kita dipanggil untuk ikut menjaga ketentraman lingkungan kita.

3. Partisipasi Menyumbang Dana

Dalam memajukan dan membangun sebuah negara pasti memerlukan dana yang sangat besar. Dana negara diperoleh dari komoditas hasil bumi serta kekayaan alam dan kewajiban warga dalam membayar pajak. Oleh sebab itu kita wajib dan bertanggung jawab membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara kita.

B. Gereja sebagai Lembaga

Sejatinya tidak ada satu manusia pun atau suatu kelompok masyarakat yang dapat menghindarkan diri dari masalah politik. Demikian juga setiap orang kristen maupun organisasi gereja sebagai suatu institusi yang hadir di tengah masyarakat. Menurut Robert Borong, setiap warga gereja diutus ke dalam dunia untuk berkarya bagi dunia ini. Dasar pengutusan itu adalah karya Allah sendiri yang telah menciptakan, yang terus memelihara, yang telah menebus dan yang terus berkarya menyempumakan ciptaan-Nya dengan selalu memberikan kebbaikannya bagi dunia. Orang Kristen adalah juga mitra Allah dalam semua tugas karya Allah yang disebut misio dei tersebut.”¹⁴

Dalam konteks ini Gereja sebagai lembaga memiliki peran yang lebih strategis lagi. Di sini gereja tidak hanya memberi kontribusi kepada pemerintah, tapi juga aktif mempengaruhi pemerintah, aktif mendorong pemerintah untuk bertindak atau mengeluarkan kebijakan yang selaras dengan kebenaran. Dalam konteks ini, peran gereja dapat dilihat dalam hal-hal berikut:

1. Gereja Sebagai Peletak Dasar

Dalam tataran jumlah, orang Kristen memang kalah dengan pemeluk agama lain, khususnya pemeluk Islam yang jumlahnya cukup besar (mayoritas) di negeri ini. Sehingga menjadikan peran sebagai peletak dasar mustahil di jalankan. Mengingat tidak ada “daya” dan “kuasa” yang cukup untuk bisa “mempengaruhi”, baik di tataran eksekutif sebagai

¹⁴ Borrong, Robert P, ETIKA POLITIK KRISTEN: Serba-serbi Politik Praktis, Hlm 3

perumus aturan perundang-undangan maupun dasar konstitusi negeri ini. Pesimisme ini tentu saja cukup beralasan. Sebab negeri ini memang dibangun bukan dengan kerangka keagamaan, apalagi Kristen. Tapi sejarah membuktikan bahwa keterlibatan Kristen dalam peletak dasar konstitusi negeri ini tidak dapat dipandang sebelah mata. Kalau tidak bisa merumuskan secara jelas point-point penting dari kekristenan, tapi setidaknya telah berhasil membendung pengaruh dasar wawasan dunia lain yang ingin menguasai dasar konstitusi negeri ini. Sebut saja tentang piagam jakarta.

Piagam Jakarta, seperti ditulis oleh Wikipedia, adalah dokumen historis berupa kompromi antara pihak Islam dan pihak kebangsaan dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) untuk menjembatani perbedaan dalam agama dan negara. Disebut juga "Jakarta Charter". Merupakan piagam atau naskah yang disusun dalam rapat Panitia Sembilan atau 9 tokoh Indonesia pada tanggal 22 Juni 1945. Antara lain, Ir. Soekarno; Mohammad Hatta; Sir A.A. Maramis; Abikoesno Tjokrosoejoso; Abdul Kahar Muzakir; H. Agus Salim; Sir Achmad Subardjo; Wahid Hasyim; dan Sir Muhammad Yamin.

Piagam Jakarta berisi garis-garis pemberontakan melawan imperialisme-kapitalisme dan fasisme, serta memulai dasar pembentukan Negara Republik Indonesia. Berikut ini merupakan nukilan butiran-butirannya yang sampai saat ini menjadi teks pembukaan UUD 1945, dengan kalimat bercetak tebal sebagai kalimat yang dihapus atau ubah:

"Kemudian daripada itoe, oentoek membentoek suatoe Pemerintah Negara Indonesia jang melindoengi segenap Bangsa Indonesia dan seloeroeh toempah darah Indonesia, dan untuk memadjoekan kessedjahteraan oemoem, mentjerdaskan kehidoepan bangsa, dan ikoet melaksanakan ketertiban doenia jang berdasarkan kemerdekaan,

*perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disoesoelah kemerdekaan
Kebangsaan Indonesia itoe dalam suatu Hoekoem Dasar Negara
Indonesia, jang terbentoek dalam suatu susunan negara Repoeblik
Indonesia jang berkedaoelatan Rakjat, dengan berdasar kepada:*

- 1. Ketoehanan, dengan kewadjiban mendjalankan sjari'at Islam bagi
pemeloek2-nja**
- 2. Kemanoesiaan jang adil dan beradab*
- 3. Persatoean Indonesia*
- 4. Kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat, kebidjaksanaan dalam
permoesjarawaratan/perwakilan*
- 5. Keadilan sosial bagi seloeroeh Rakjat Indonesia.”¹⁵*

Sejarah mencatat, sekitar dua bulan sebelum proklamasi, atau Mei 1945, para pendiri negara mempersiapkan perangkat-perangkat yang dibutuhkan sebuah negara yang berdaulat. Dan pada 28 Mei dibentuklah suatu badan yang diberi nama BPUPKI, yang diketuai Dr. Radjiman Wediodiningrat. Badan yang punya anggota sebanyak 62 orang ini, pada sidang pertama (29 Mei 1945) membahas apa dasar negara yang akan terbentuk nanti. Dari 62 anggota, 35 orang yang berlatar belakang Islam menghendaki Islam sebagai dasar negara. Selebihnya, kaum nasionalis atau kebangsaan tidak menginginkan peran agama dalam negara. Setelah melalui perdebatan yang seru dan panjang, dan dicapainya kompromi politik, pada 22 Juni 1945 akhirnya panitia ini berhasil merumuskan suatu konsensus politik yang mencerminkan dan mewadahi aspirasi semua golongan. Konsensus para founding father tersebut kini kita kenal dengan nama Piagam Jakarta.

¹⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Piagam_Jakarta

Pada 18 Agustus 1945, atau sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Bung Hatta, mengusulkan agar tujuh kata dalam Piagam Jakarta, yakni: “dengan kewajiban syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, dihilangkan dari teks Piagam Jakarta itu. Hal ini karena ada keberatan dari tokoh-tokoh Indonesia dari bagian timur yang tidak menghendaki adanya kata-kata yang kesannya hanya menyangkut satu golongan saja dari masyarakat Indonesia, kendati pun golongan itu mayoritas. Konon tokoh-tokoh dari bagian timur negeri ini mengancam memisahkan diri dari negara yang akan dibentuk itu apabila ketujuh kata tersebut tidak dicabut dari Piagam Jakarta yang merupakan Pembukaan UUD 45. Di samping itu ada kekhawatiran bahwa pihak Belanda yang berusaha untuk menguasai Indonesia kembali, akan memanfaatkan kelompok yang tidak menghendaki ketujuh kata tersebut. Jika demikian, maka persatuan dan kesatuan Indonesia bisa pecah (Silalahi, 2001).

Tokoh Kristen Di seputar proklamasi, memang ada tiga orang tokoh dari kalangan kristiani dan ketiganya berasal dari kawasan timur Indonesia. Mereka itu masing-masing Mr. A.A Maramis, Sam Ratulangi, dan Johannes Latuharhary. AA Maramis bahkan masuk dalam keanggotaan BPUPKI. Sementara Sam Ratulangi dan Latuharhary jadi anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), mewakili daerah masing-masing. Bagaimana peran mereka bertiga dalam kepanitiaan yang turut membidani lahirnya NKRI waktu itu? Ada yang mengatakan bahwa salah seorang dari merekalah yang membisiki Bung Hatta agar ketujuh kata dalam Piagam Jakarta itu dihapus. Namun hal ini dibantah oleh DR Yudha Tangkilisan, pengajar sejarah dari Universitas Indonesia (UI) Depok, Jawa Barat.

Tangkilisan menjelaskan, sehari setelah proklamasi dimaklumkan, PPKI mengadakan pertemuan guna membicarakan tiga hal: penetapan presiden dan wakil presiden, UUD, dan pembentukan parlemen. Ketika panitia sedang berembuk, datanglah seorang perwira tentara Jepang,

Maeda. Dia membawakan pesan dari rakyat Indonesia bagian timur yakni Maluku, Bali, Sulawesi, dll, bahwa kalau dasar negara ditetapkan dengan Piagam Jakarta, maka masyarakat yang bermukim di bagian timur akan memisahkan diri. Kemudian gagasan ini dibawa Bung Hatta ke forum di mana ada KH Mas Mansyur, KH Wahid Hasyim, dan tokoh lain termasuk Bung Karno. Dia meminta agar tujuh kata itu dihapus dari Pembukaan UUD 45. Tentang dihapusnya ketujuh kata ini, kalangan Islam moderat biasanya mengatakan bahwa ini adalah hadiah umat Islam untuk kemerdekaan RI. Tetapi pihak yang tidak menerima penghapusan ketujuh kata itu, sempalannya hingga kini masih terus berusaha memperjuangkan pengembaliannya, sampai melakukan gerakan-gerakan separatisme.¹⁶

Gereja sebagai peletak dasar tidak harus selalu dilihat dalam konteks besar pengaruhnya terhadap kontitusi. Tapi bagaimana gereja bisa mendidik jemaatnya, gereja bisa mempersiapkan jemaatnya sebagai calon pemimpin negeri ini yang militan dan berintegritas. Sehingga, ketika kelak mereka nanti duduk di pemerintahan atau parlemen, mereka betul-betul bisa memberi warna di parlemen atau pemerintahan, dan bukan membaaur menjadi satu warna dalam keputusan dan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat dan kemanusiaan.

2. Gereja Sebagai Corong “Suara Kenabiaan”

Suara kenabian tidak bisa dipahami terlepas dari tugas penting dari seorang nabi Allah. Secara umum pengertian “Nabi” adalah seorang hamba Tuhan yang dipanggil untuk menyampaikan Firman Allah kepada manusia. Jadi nabi adalah wakil, sekaligus representasi Allah di bumi. Para nabi dalam Perjanjian Lama bertindak sebagai pembicara atas nama Allah. Ada

¹⁶

<http://reformata.com/news/view/5960/siapa-yang-hapus-7-kata-dari-piagam-jakarta>

beberapa nama yang sudah tidak asing lagi di telinga, seperti Musa, Elia, Amos, Yesaya dll, yang bertugas sebagai Nabi Allah.

Sebagai seorang nabi, tugas mereka tidak hanya sebatas menghafal atau menyebut ulang apa yang mereka dengar dari Allah untuk disampaikan, tapi juga perlu memiliki keberanian dan integritas. Tanpa itu, tugas kenabiahnya tidak akan berjalan sebagaimana mestinya, seperti apa yang Tuhan harapkan kepadanya. Sebab seringkali mereka harus menentang raja atau rakyat (Israel) sendiri yang telah menyimpang dari kehendak Tuhan.

Seperti itu juga tugas gereja yang berfungsi sebagai Nabi Allah dalam menyuarakan suara kebenaran, suara kenabian. Gereja sebagai lembaga dituntut untuk kritis sekaligus peka terhadap kebenaran sekaligus fenomena sosial di sekitar mereka. Dalam kaitannya dengan itu gereja dituntut menjalankan dua fungsi sekaligus. Pertama, gereja sebagai lembaga yang mengawasi pemerintah, kedua gereja sebagai “wakil Allah” yang menyuarakan suara kebenaran dan keadilan sebagai presentasi suara kenabian. Untuk itu kadangkala gereja pun harus berani berdiri sebagai “oposan”, demi melawan kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada kebenaran dan keadilan.

Namun teramat disayangkan, dalam praktiknya gereja justru memanfaatkan fungsi ini sebagai dalih pembenaran sikap mereka yang sesungguhnya bukanlah suara kebenaran, tapi suara yang menguntungkan lembaga mereka sendiri. Bukan hal asing lagi, karena telah mencuat ke publik melalui media, bahwa gereja “menunggangi” fungsi ini sebagai pembenaran terhadap pilihan politik kepala gereja. Masih sangat hangat, beberapa bulan lalu

Ketua lembaga gereja aras nasional secara terang-terang membuat surat edaran menyerukan dukungannya terhadap salah satu capres RI pada kampanye pemilihan umum tahun 2014. Dalam Surat edaran tersebut dia mengatakan, agar memilih capres RI tertentu. Alasannya, “Capres harus

berlatar belakang militer. Menurutnya, Presiden yang dimiliki Indonesia dari unsur sipil tidak berhasil sejak reformasi bergulir. “Bahwa calon presiden juga harus sudah kaya karena ketika berkuasa tidak akan mencari kekayaan untuk memperkaya dirinya.”¹⁷

Banyak orang menyayangkan pernyataan seorang pendeta, sekaligus representasi Allah di dunia, dan kepala sebuah lembaga kekristenan yang penting di Indonesia ini. Alih-alih memberikan arahan yang baik tentang kriteria sesuai dengan firman Allah, Pendeta ini justru menyarankan atau mengarahkan umat memilih calon yang diinginkannya. Pendeta yang seharusnya memberi pencerahan kepada umat ini justru malah “menyeret” gereja ke dalam ranah politik praktis.

Dalam konteks gereja dan negara, maka gereja sebagai institusi jelas tidak boleh berpolitik. Tidak boleh ada edaran mengatasnamakan sebuah institusi gereja, atau kampanye resmi menggunakan mimbar gereja. Jemaat, di tiap gereja pasti memiliki pandangan tersendiri dalam berpolitik dan itu sah dan dijamin UU. Keterlibatan institusi seperti itu bisa menjadi pemaksaan kehendak yang melanggar hak jemaat sebagai warga negara. Namun disisi lain, gereja sebagai institusi tidak boleh abai dalam memberi pendidikan politik, sehingga umat melek politik. Tapi dalam membuat putusan tiap pribadi, umat mandiri, begitu juga pendeta. Pendeta yang memilih masuk partai politik, dan menjadi anggota, semestinya memisahkan diri dari institusi gereja (mengundurkan diri). Sementara tiap pendeta, sebagai pribadi, punya hak bersikap dan memilih yang mandiri.

Sebagai salah satu bentuk konkrit dari corong suara kenabian, gereja perlu menuntut pemerintah agar mencabut surat keputusan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri no. 01/ber/mdn-

¹⁷ <http://reformata.com/news/view/7789/dukung-prabowo-pgpi-tebar-surat-edaran>

mag/1969, Tentang pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan Dalam Menjamin Ketertiban Dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan Dan Ibadat Agama Oleh Pemeluk-Pemeluknya. Sebab surat ini sangat diskriminatif dan kental dengan nuansa pembatasan terhadap upaya umat minoritas dalam mengekspresikan keyakinannya secara mandiri. Mengapa SKB ini perlu ditolak. Setidaknya ada 6 alasan penting, seperti dikemukakan Tabloid Reformata dalam salah satu tulisannya:

6 Alasan Penolakan SKB

1. Bersifat diskriminatif dan kriminogen (berpeluang menimbulkan kejahatan) dan berpotensi terjadinya pelanggaran HAM.
2. Esensinya tidak sesuai, bahkan bertentangan dengan UUD 1945.
3. Dalam prakteknya, telah dijadikan alat pembenaran untuk melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum.
4. Telah membuahkan tindakan-tindakan anarkis dan perlakuan semena-mena dalam bentuk penutupan, penyegelan, pembakaran dan perusakan rumah ibadah.
5. Tidak memiliki legitimasi hukum yang berdasarkan Tap MPR No. III Tahun 2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.
6. Merangsang timbulnya pengelompokan masyarakat berdasarkan agama yang pada gilirannya mengancam kesatuan negara RI.¹⁸

Tidak hanya SKB ini, gereja juga wajib menuntut pemerintah agar tidak mudah menyegel atau menutup gereja atas nama masyarakat atau

¹⁸ Tabloid Reformata Edisi 37 April 2006

kelompok tertentu. Mendorong agar pemerintah membuka akses bagi gereja-gereja yang ditutup, seperti GKI Yasmin, agar bisa digunakan lagi sebagai tempat beribadah umat. Ini semua adalah ekspresi dari hak sekaligus peran gereja dalam perpolitikan di Indonesia.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan dan Saran

Gereja, baik sebagai lembaga (organisasi) maupun orangnya (organ) memiliki tanggung jawab penting dalam bangsa ini. Tanggungjawab itu tidak saja ada dan mengemuka dalam “kepasifan” gereja tunduk terhadap aturan negara dan perundang-undangan, tapi juga secara aktif berkontribusi dalam ranah politik. Bukan dalam rangka terjun di politik praktis, tapi lebih mempersiapkan umat agar melek politik. Dengan demikian umat tidak dijadikan sebagai sapi perah suara pemilu saja. Keaktifan gereja sebagai lembaga dan perorangan dalam ranah politik juga menjadi tolok ukur bagi suara kristen di parlemen dan pemerintahan. Sehingga kelak nilai-nilai kekristenan dapat menjadi warna di sana. Setidaknya suara-suara kristen dapat disuarakan, baik dalam ranah parlemen, maupun di ranah publik.

Untuk itu gereja sebagai lembaga perlu mendidik jemaatnya dengan pendidikan politik yang baik. Gereja perlu mendidik jemaatnya agar menjadi kader militan dan berintegritas, baik di parlemen maupun pemerintahan. Lebih dari itu, gereja sebagai lembaga pun perorangan bisa mengerti tugas utama mereka hadir ke dunia untuk menyuarakan warta kebenaran, kabara sukacita dari Injil kristus. Hal ini tidak saja ditunjukkan dalam proklamasi atau pewartaan, tapi juga dalam sikap dan gaya hidup hari demi hari.

B. Kepustakaan

1. van den End Thomas, Harta dalam bejana: sejarah gereja ringkas: BPK Gunung Mulia
2. Budiardjo Miriam, Dasar-dasar Ilmu Politik: Gramedia Pustaka Utama, 2008,
3. Borrong, Robert P, ETIKA POLITIK KRISTEN: Serba-serbi Politik Praktis,
4. Pdt. Saut Hamonangan Sirait, Politik Kristen di Indonesia: suatu tinjauan etis:BPK Gunung Mulia
5. Dr. Jan S. Aritonang dan Dr. Chr De Jonge, Apa dan bagaimana gereja?: pengantar sejarah eklesiologi: BPK Gunung Mulia, 1989,
6. Herman Bavinck Johan, Sejarah Kerajaan Allah 2 Perjanjian Baru: BPK Gunung Mulia, 1986,
7. _____, 1996, Lima dokumen keesaan gereja Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (LDKG-PGI): keputusan Sidang Raya XII PGI, Jayapura, 21-30 Oktober 1994: BPK Gunung Mulia
8. E. Martasudjita, Pr., 2003, Sakramen-Sakramen Gereja: Tinjauan Teol, Liturgis, Past: Kanisius,
9. Sumber Website Diakonia PGI
10. SETARA Institute, Tiga Tahun Laporan Kondisi KebebasanBeragama/ Berkeyakinan di Indonesia 2007-2009
11. PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA DI INDONESIA: Mengamati Penutupan Tempat-tempat Ibadah Sepanjang 2004-2007
12. <https://id.wikipedia.org/>
13. <http://kbbi.web.id/>
14. <http://reformata.com>
15. Tabloid Reformata